

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TARGETKAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2017 DI ATAS 85 PERSEN



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penyerapan anggaran pada 2017 ini di atas 85 persen. Target itu lebih tinggi dibandingkan realisasi penyerapan anggaran 2016.

Berdasarkan data di laman sistem informasi monitoring dan evaluasi Pemprov DKI Jakarta, publik.bapedadki.net, penyerapan anggaran hingga saat ini baru mencapai 38,8923 persen. Bappeda akan terus mengecek dan mengevaluasi anggaran yang belum diserap.

Menurut Tuty, tingginya penyerapan anggaran biasanya terjadi dalam dua bulan terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, Pemprov DKI biasanya membayar belanja modal berupa konstruksi fisik yang telah dikerjakan vendor.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, penyerapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 bisa mencapai 86 persen atau lebih tinggi dari tahun lalu sekitar 82,15 persen. "Kami ingin menaikkan dari tahun lalu. Jadi kita tadi diproyeksikan (penyerapan anggaran) mudah-mudahan bisa naik jadi 86 persen," kata Anies di Balai Kota Jakarta.

Pernyataan Anies ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. "Nanti akhir tahun prediksi kita akan 86 persen, nggak bisa 100 persen," ucap Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Saefullah, Pemprov DKI akan mempercepat upaya penyerapan anggaran. Namun demikian, pihaknya akan memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga tidak berkesan dipaksakan atau mengada-ada hanya karena menjelang akhir tahun. "Yang jelas proyek yang betul-betul sudah aman, jadi yang real tidak dipaksakan, karena sudah dipenghujung tahun jangan sampai nanti kesannya mengada-ada, nanti diakhir tahun di 31 Desember baru kelihatan," ungkapnya.

Saefullah menambahkan, ada beberapa faktor yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran, diantaranya efisiensi hasil lelang, beberapa proyek seperti rusun yang belum selesai, pun dengan kantor kelurahan juga belum rampung pengerjaannya.

"Khususnya untuk rusun, di Dinas Kesehatan, di Dinas Pendidikan, ada beberapa kantor kelurahan juga tidak selesai," tandas mantan Walikota Jakarta Pusat itu.

Sumber:

1. <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/04/19005041/dki-targetkan-penyerapan-anggaran-2017-di-atas-85-persen>
2. <http://www.jurnalisme.netralnews.com/news/hits/read/119518/.gubernur.dki.jakarta.anies.ba.swedan.apbd.dki.2017.pemprov.dki>

Catatan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Di penjelasan dijelaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.
- Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Lembaga Kementerian

Negara/Lembaga menyatakan bahwa indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana pada ayat (2) meliputi

- a. Penyerapan anggaran
- b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- c. Pencapaian keluaran; dan
- d. Efisiensi.